

KAPABILITAS SISTEM POLITIK SEBAGAI PARAMETER KEBERHASILAN SUATU PEMERINTAHAN

AGUS DEDI

Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten
DPK FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, kapabilitas sistem politik dianggap sebagai sebuah parameter yang dapat mengukur keberhasilan atau prestasi suatu negara. Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia saat ini telah banyak menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdaulat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator kapabilitas sistem politik yang meliputi: Kapabilitas ekstratif, kapabilitas distributif, kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, dan kapabilitas dalam negeri dan internasional. Keenam jenis kapabilitas ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan pada akhirnya hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh tentang sistem politik Indonesia berdasarkan data dan fakta yang ada kemudian disesuaikan dan dihubungkan dengan beberapa teori sistem politik Indonesia. Hasil penelitian ini juga sekaligus memberikan gambaran tentang beberapa capaian dari kapabilitas sistem politik pemerintahan Indonesia saat ini, walaupun ada beberapa kapabilitas sistem politik yang belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkomitmen sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Kata Kunci: *Kapabilitas, Sistem, Politik, dan Pemerintahan.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu parameter yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu penyelenggaraan sebuah pemerintahan adalah kapabilitas sistem politik. Dalam pandangan penulis, kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi setiap tantangan, tuntutan dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983:163), bahwa kapabilitas sistem politik harus menghasilkan pola hubungan baru

antara tuntutan dan dukungan dalam sistem politik yang bersangkutan. Perubahan dalam besaran maupun isi aliran *input* atau *output* akan sangat menunjukkan kemampuan sistem tertentu dalam menyelesaikan masalahnya. Pendapat ini semakin menegaskan, bahwa ukuran keberhasilan sebuah sistem politik dalam suatu pemerintahan akan ditentukan oleh seberapa jauh pemerintahan tersebut melalui sistem politik yang ada mampu merealisasikan beberapa kapabilitas politik yang harus ada dalam sebuah pemerintahan.

1. Kapabilitas Sistem Politik

Sebagai sebuah sistem, kapabilitas memiliki peranan penting dalam mewujudkan sebuah prestasi atau keberhasilan suatu pemerintahan. Untuk mendapatkan gambaran tentang keberhasilan suatu pemerintahan tersebut perlu dipahami secara terinci tentang kapabilitas atau kemampuan sistem politik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan sistem politik menurut Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr. dalam Silahudin (2011:13) terdapat enam macam, yaitu:

- a. *The extractive capability*;
- b. *The distributive capability*;
- c. *The regulative capability*;
- d. *The symbolic capability*;
- e. *The responsive capability*;
- f. *Domestic and international capability*.

Yang pertama, *The extractive capability* (kemampuan ekstraktif) adalah mengenai *performance* dari sistem politik dalam mengelola sumber-sumber material dan manusiawi dari lingkungan domestik maupun internasional.

Yang kedua, *The distributive capability* (kemampuan distributif) menunjukkan pada alokasi atau distribusi dari berbagai jenis barang, jasa dari sistem politik pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi

segala kesempatan, keuntungan dan manfaat bagi masyarakat.

Yang ketiga, *The regulative capability* (kemampuan regulatif) adalah kemampuan suatu sistem politik dalam mengontrol atau mengendalikan perilaku individu-individu atau kelompok-kelompok yang berada dalam sistem politik tersebut. Itu sebabnya kemampuan regulatif mempunyai jangkauan terhadap kehidupan individu maupun kelompok, begitu besarnya kekuatan sistem politik sehingga hampir segenap bidang kehidupan individu tak ada yang berada diluar jangkauannya.

Yang keempat, *The symbolic capability* (kemampuan simbolik) menunjukkan pada efektivitas, mengalirnya simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra-masyarakat maupun lingkungan ekstra-masyarakat menentukan tingkat kemampuan simbolik ini. Maksudnya ialah patut dibedakan antara kapabilitas simbolik dengan *output* simbolik. Dalam *output* simbolik didalamnya termasuk antara lain penegasan atau pengukuhan nilai-nilai oleh elit, pangeran kekuatan atau upacara militer, kunjungan pejabat tinggi.

Yang kelima, *The responsive capability* (kemampuan responsif) atau daya tanggap suatu sistem politik ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Sistem politik harus senantiasa tanggap terhadap setiap tekanan dan tuntutan-tuntutan yang datangannya dari lingkungan internal maupun eksternal.

Yang keenam, *Domestic and international capability*. Sistem politik secara niscaya berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Kapabilitas domestik suatu sistem politik sedikit banyak juga ada pengaruhnya terhadap kapabilitas internasional. Yang dimaksud dengan kapabilitas internasional adalah kemampuan yang memancar dari dalam keluar. Tingkah laku internasional suatu sistem politik dapat dilihat dari kemampuan ekstraktif internasional dalam bentuk pendapatan dan perdagangan internasional, keuntungan dan penanaman modal di negara lain dan lain-lain. Itulah penjelasan tentang konsep keenam kapabilitas sistem politik yang harus dimiliki oleh setiap pemerintahan di dalam menjalankan kehidupan politiknya.

Dalam konteks yang lain, Plato dalam Rusadi (1983:162) menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah negara dapat diukur dari pandangan moral, etika, dan hal-hal yang normatif. Selaras dengan hal itu, Arifin dalam Silahudin (2010:12) menjelaskan bahwa kemampuan sistem politik oleh suatu negara dalam periode tertentu ternyata lebih baik atau stabil dibandingkan dengan periode-periode yang lainnya. Jadi kemampuan sistem politik dapat dijadikan sebuah tolok ukur atau barometer berhasil atau gagalnya suatu sistem politik di sebuah negara. Sistem politik sebagai sistem terbuka dikelilingi oleh lingkungan yang akan mempengaruhinya, dan

dalam lingkungan tersebut terdapat sejumlah tantangan. Karenanya sistem politik harus dapat menjawab tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu sebabnya, proses politik terutama dewasa ini dan masa yang akan datang sangat tergantung pada lingkungan serta sumber-sumber itu sendiri, juga sangat tergantung pula pada manusianya bermain dalam politik. Proses politik adalah mekanisme tentang bagaimana tuntutan-tuntutan mendapatkan penyaluran dan tanggapan yang semuanya sangat tergantung pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sistem politik yang bersangkutan.

Dalam pandangan lainnya, secara tegas Rusadi menjelaskan, bahwa secara empirik dan prestasi yang diperoleh sistem politik dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai hasil usaha masyarakat dan kebijaksanaan pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, mengetahui kemampuan sistem politik dapat juga diketahui lebih mendalam tentang soal-soal perubahan-perubahan politik. Perubahan atau prakarsa perubahan politik tersebut dapat berasal dari tiga sumber, yaitu dari elit yang duduk dalam pemerintahan, dari kelompok-kelompok dalam infrastruktur politik, dan dari lingkungan internasional.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Sistem Politik

Hal lain yang perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan kapabilitas atau kemampuan sistem politik adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Kemampuan sistem politik sangat tergantung pada bagaimana elit politik dalam merumuskan dan menentukan tujuan dan tindakannya. Itu sebabnya, setiap sistem politik dalam menanggapi setiap tuntutan dan bahkan tekanan-tekanannya baik yang datang dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal tidak menyebabkan secara serta merta adanya perubahan struktur yang bersangkutan. Arifin dalam silahudin (2010:17) menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat dan pola kemampuan sistem politik. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, tanggapan atau respons para elit politik terhadap *input* yang berwujud tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat internasional.

Kedua, kemampuan sistem politik juga dipengaruhi oleh sumber-sumber material yang diperlukan untuk menjalankan sistem politik. Oleh sebab itu, seberapa besar atau banyak sumber-sumber material yang ada dan dapat dipergunakan oleh sistem politik agar mampu mempengaruhi kemampuan sistem politik. Artinya, semakin banyak sumber-sumber material yang tersedia maka semakin memungkinkan berkembangnya kemampuan sistem politik.

Ketiga, yang mempengaruhi sistem politik adalah birokrat atau aparat-aparat organisasi sistem politik itu sendiri. Dalam hal ini misalnya apakah birokrat berkembang dengan baik atau tidak. Apakah dalam menjalankan fungsinya mempergunakan cara-cara yang kotor atau menunjang terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Keempat, faktor lain yang mempengaruhi kemampuan sistem politik tingkat dukungan terhadap sistem politik itu sendiri. Artinya, sistem politik dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya tidak terlepas dari adanya dukungan. Dengan kata lain, sistem politik jelas membutuhkan dukungan dalam melaksanakan aktivitasnya. Apabila dukungan masyarakat terhadap sistem politik itu rendah maka hal seperti itu akan merintang perkembangan kemampuan sistem politik. Sebaliknya apabila dukungan masyarakat terhadap sistem politik itu besar maka akan mendukung perkembangan kemampuan sistem politik negara bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan sistem politik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu yang menunjang atau mendukung keberhasilan capaian target keberhasilan suatu pemerintahan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan tentang beberapa kapabilitas sistem politik

dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan kapabilitas sistem politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Whitney (1960:160) yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Fenomena yang diteliti yaitu kapabilitas sistem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Selain itu alasan yang mendasar digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah: (1) masalah penelitian sudah tergambarkan; (2) untuk memahami makna dibalik data yang tampak; (3) kehidupan politik saat ini yang dilandasi oleh kapabilitas sistem politik yang tengah berlangsung.

C. PEMBAHASAN

Capaian Kapabilitas Sistem Politik dalam Pemerintahan Saat Ini

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu

parameter untuk mengukur prestasi atau keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari kapabilitas sistem politik. Merujuk pada hal itu, penulis deskripsikan capaian-capaian prestasi yang terpotret dari pemerintahan saat ini.

Salah satu teori yang dikembangkan Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr. Tentang kapabilitas sistem politik yang meliputi *The extractive capability*, *The distributive capability*, *The regulative capability*, *The symbolic capability*, *The responsive capability* dan *Domestic and international capability*.

Keenam kemampuan sistem politik tersebut akan penulis jelaskan satu demi satu agar diperoleh gambaran yang lebih jelas untuk mengkaji atau menganalisis permasalahan dalam pemerintahan. Selain itu dengan deskripsi ini akan diperoleh gambaran tentang capaian-capaian prestasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Deskripsi analisis berikut akan membahas beberapa pembuktian dan contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan kapabilitas sistem politik pada masa pemerintahan Jokowi. Analisis ini akan diuraikan dengan merujuk pada beberapa data dan fakta yang ada dalam pemerintahan Jokowi.

Dari aspek kemampuan ekstraktif, pemerintahan Jokowi telah melakukan terobosan nyata berupa kemampuan melakukan negosiasi dengan pihak Freeport, Caltecs dan Arum. Ketiga perusahaan besar ini

menggali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia akan tetapi masih dikelola oleh pihak asing. Akan tetapi meskipun ketiga perusahaan itu masih dikelola oleh pihak asing, Indonesia mampu mencapai negosiasi khusus untuk Freeport kepemilikan saham sebesar 51 %. Artinya, bahwa pemerintahan dianggap mampu mengendalikan perusahaan-perusahaan besar yang masih menggunakan campur tangan pihak luar.

Selain itu pemerintah saat ini telah banyak memanfaatkan tenaga kerja di daerah setempat yang memiliki kapasitas untuk menggali dan mengelola sumber daya alam yang ada di tanah air sendiri. Dengan kondisi seperti ini pemerintah telah memanfaatkan hasil dari kekayaan alam Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, dampak dari kemampuan negosiasi tersebut berimplikasi pada pelibatan warga setempat untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian dipandang dari kemampuan ekstratif, pemerintahan saat ini telah melakukan terobosan.

Dari aspek kemampuan distributif dapat dijelaskan bahwa pemerintahan Jokowi dianggap sudah memiliki kemampuan yang baik dalam kemampuan distributif. Buktinya dapat dilihat dari harga bahan bakar minyak antara Pulau Jawa dan Pulau Papua pada saat pemerintahan terdahulu harga bahan bakar minyak memiliki perbedaan yang sangat jauh. Sedangkan pada masa pemerintahan

saat ini dibawah kepemimpinan Jokowi harga bahan bakar minyak di daerah Pulau Jawa dan Pulau Papua memiliki harga yang sama.

Kemudian dalam bidang infrastruktur pemerintahan Jokowi mampu melakukan perubahan secara signifikan. Contohnya, pembangunan infrastruktur jalan di Papua sudah dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, biasanya masyarakat menempuh jarak antara kota satu ke kota yang lain ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, kini masyarakat dapat menempuh jarak antara kota ke kota dengan waktu yang jauh lebih singkat. Pernyataan di atas menunjukan bahwa pemerintahan Jokowi dari aspek kemampuan distributif dapat dikatakan berhasil.

Dari aspek kemampuan regulatif dapat dijelaskan, bahwa sebuah aturan sebaiknya saling mendukung dengan sistem politik yang ada. Artinya bahwa aturan itu harus mampu menjamin dan mengakomodir kepentingan individu atau kelompok dalam menjalani kehidupannya. Dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa sebuah aturan idealnya mampu menata dan mengatur sebuah aktivitas atau tingkah laku individu atau kelompok dalam sebuah komunitas. Perlu dijelaskan pula pada bagian ini, bahwa kapabilitas regulatif juga menyangkut hal penyelenggaraan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok sehingga regulasi atau aturan benar-

benar diperlukan agar tidak terjadi munculnya benturan pendapat saat individu atau kelompok berinteraksi dengan yang lain. Sebagai contoh dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Idealnya pemerintah mampu mencegah pengangguran di negaranya sendiri melalui penyaluran tenaga kerja yang diatur melalui sistem ketenagakerjaan yang baik. Artinya, aturan harus menjamin dan berpihak kepada masyarakat sebagai warga negara yang dijamin dalam Undang-undang. Dengan sistem seperti ini, masyarakat dapat terakomodir berbagai kepentingannya sebagai upaya untuk kelangsungan hidupnya.

Dari aspek kemampuan simbolik dapat dijelaskan, bahwa kemampuan simbolik yang baik dapat dilihat dari indikator bahwa semakin diterimanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dirasakan oleh rakyat, maka akan tercermin semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik dalam pemerintahan tersebut. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai respon yang baik dari masyarakat. Salah satu contohnya pemerintahan Jokowi membuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berorientasi pada upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Affan Gafar (2006:3). yaitu “Dalam pemahaman secara normatif

demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh negara seperti misalnya kita mengenal ungkapan Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Program-program tersebut mencerminkan, bahwa pemerintahan Jokowi peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari aspek kemampuan responsif, Pemerintahan Jokowi dianggap sudah bagus. Indikatornya dapat dilihat dari responsibilitas pemerintah di dalam membuat sebuah kebijakan didasarkan atas aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Kebijakan yang baik ini dapat ditunjukkan oleh Pemerintahan Jokowi di dalam upaya mengakomodir berbagai keinginan masyarakat yang kemudian dapat direalisasikan dalam bentuk undang-undang. Salah satu keinginan masyarakat yang direalisasikan oleh pemerintah di antaranya adalah lahirnya Undang-Undang tentang Menolak Kekerasan Terhadap Anak. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintahan Jokowi responsif terhadap kondisi yang diinginkan oleh masyarakat untuk menolak kejahatan yang bersumber dari kekerasan terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur agar pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak diberi sanksi hukum yang tegas. Undang-undang ini juga sebagai bentuk kepedualian pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah

terhadap anak-anak Indonesia. Contoh kasus lain yang dapat dikemukakan adalah dibubarkannya Ormas Islam yang radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena perjuangan HTI terbukti bertentangan dengan Pancasila. Analisis tersebut sejalan dengan teori Kontrak Sosial, salah satu diantaranya adalah lahirnya seorang pemimpin melalui proses mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum itu sendiri merupakan bentuk kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih. Secara tegas, Dede Mariana menegaskan bahwa (2008:32) “Sebagai suatu bentuk kontrak sosial, Pemilu memuat perjanjian antara rakyat dengan mereka yang diberi mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kontrak ini dibuat dengan pemenang pemilu (Partai maupun Presiden terpilih) sebagai bukti, bahwa program-programnya sesuai dengan aspirasi rakyat”.

Dari aspek kapabilitas domestik dan internasional, yang menjadi tolak ukur baik buruknya kapabilitas ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menjalin hubungan interaksi di dalam negeri maupun luar negeri. Implementasi dari kapabilitas ini jika stabilitas di dalam negeri baik maka kondisi dan situasi di dalam negeri akan mencerminkan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian jika stabilitas di dalam negeri terlaksana dengan baik maka kapabilitas internasional pun akan berjalan baik. Menurut pendapat

penulis, menyoroiti aspek domestik dan internasional pemerintah Jokowi sudah dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari negara Indonesia saat ini telah menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berisikan 15 negara. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia, dimana pemerintahan sebelumnya Indonesia belum pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dengan demikian hal itu menunjukkan, bahwa Indonesia eksis di kancah internasional. Prestasi lain yang telah dicapai oleh Indonesia saat ini adalah mendorong negara-negara Islam untuk bersatu mendudukkan kembali Palestina menjadi sebuah negara yang berdaulat. Apa yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia didalam kancah internasional selaras dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Politik luar negeri Indonesia bebas aktif”. Bebas dalam arti Indonesia tidak berafiliasi ke salah satu blok. Aktif yang berarti turut serta menciptakan perdamaian dunia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah Indonesia tergabung dalam G-20 atau Kelompok Duapuluh Ekonomi Utama, yaitu kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Tujuan dari kelompok negara ini adalah mewadahi negara-negara industri dan berkembang secara bersama-sama untuk mendiskusikan

berbagai masalah pokok di bidang ekonomi dunia. Eksisnya negara Indonesia dalam kelompok G-20 menunjukkan kapabilitas internasional yang layak diapresiasi dari Pemerintahan Jokowi saat ini. Selain itu, hal ini menjadi poin penting yang menjadi tonggak dalam sejarah kepemimpinan Jokowi saat ini.

D. KESIMPULAN

Pemerintahan Indonesia saat ini telah banyak menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdaulat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator kapabilitas sistem politik yang meliputi: kapabilitas ekstratif, kapabilitas distributif, kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, dan kapabilitas dalam negeri dan internasional. Hasil penelitian yang telah dipaparkan memberikan gambaran yang utuh tentang sistem politik Indonesia berdasarkan data dan fakta yang ada kemudian disesuaikan dan dihubungkan dengan beberapa teori sistem politik Indonesia sebagai implikasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga sekaligus memberikan gambaran tentang beberapa capaian dari kapabilitas sistem politik pemerintahan Indonesia saat ini cukup signifikan. Walaupun ada beberapa kapabilitas

sistem politik yang belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena saat ini sumber daya manusia yang ada di Indonesia belum semuanya mampu menjawab tantangan dan tuntutan secara komprehensif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Gaffar , Affan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kantraprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Bandung.

Mariana, Dede. 2008. *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal Di Indonesia*. Bandung: AIPI bekerja sama dengan Pslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Silahudin. 2011. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Kultur dan Struktural Fungsional*. Bandung: Kelir.

Whitney,F.L.1960. *The Element of Research*. Asian Ed., Oversease Book Osaka.

Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945